

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Terorisme dapat terjadi pada skala domestik maupun Internasional. Terorisme dapat dilakukan dengan berbagai motif, seperti kemakmuran, patriotisme, kepuasan psikologis, idealisme revolusioner, atau bahkan untuk membalas dendam. Apapun motif yang menjadi tujuannya, terorisme dapat terjadi secara tiba-tiba, cepat, dan melanggar hukum di tempat-tempat yang tidak terduga. Terorisme dapat membawa kerusakan bahkan kematian dan menciptakan kefrustasian bahkan kesia-siaan. Dari seluruh kawasan yang terdapat di dunia ini, Timur Tengah menjadi tempat yang paling rentan untuk melebarkan sayap terorisme. Timur tengah adalah tempat dimana perang terbuka, pemberontakan, dan terorisme menjadi cara hidup bagi beberapa kelompok masyarakatnya (Hamilton. D 1974: 373).

Timur Tengah adalah tempat dibumi yang menjadi pusat dari lahirnya agama-agama *Samawi* (monoteisme) seperti Yahudi, Kristen, Islam, serta tempat awal perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Selama pertengahan abad ke-20 sampai saat ini, Timur Tengah telah menjadi pusat terjadinya peristiwa-peristiwa dunia, dan menjadi wilayah yang sensitif baik dari segi wilayah, politik, ekonomi, militer, kebudayaan, dan keagamaan. Hal ini juga dikarenakan terdapat kesenjangan antara negara Timur Tengah yang di isi dengan kediktatoran, xenophobia, dan fundamentalis. Di beberapa tempat di Timur Tengah, budaya sekuler berkembang, tapi di beberapa tempat lain, orang-orang saling membunuh atas nama Tuhan. Namun terdapat perbedaan cara-cara antara negara dengan kelompok atau organisasi dalam mendapatkan kepentingan ideologi, agama, atau politik (Martin, K 1997: 91).

Terdapat empat negara besar di Timur Tengah yang paling dapat membuktikan narasi tersebut, yaitu Israel, Arab Saudi, Turki, dan Iran. Empat

negara tersebut paling berpengaruh dalam perkembangan stabilitas dan destabilitas Timur Tengah. Israel, negara dengan agama Yahudi dalam menjalankan konstitusinya, memiliki tujuan untuk memperluas wilayahnya guna melindungi tempat yang dianggap “Tanah Suci”, dengan menjajah negara-negara disekitarnya yang mayoritas di huni Islam. Arab Saudi, sebagai negara yang menjadi kiblat bagi Islam Sunni sebagai mayoritas dari agama Islam, menggunakan kekayaannya dalam menjalin kekuatan dengan Barat dan negara Sunni lain, guna menghilangkan Syiah yang dianggap memiliki pandangan salah dalam menjalankan agama Islam. Turki, adalah contoh negara paling sekuler yang sedang mencoba mengembalikan statusnya sebagai negara Islam dengan menyingkirkan sekularitas yang dianggap sebagai cara Barat mempengaruhi negaranya. Iran juga tidak berbeda dalam mengejar pengaruh dan kekuasaan, menggunakan totalitarian dan supremasi ideologi, juga metode untuk mendukung ideologi tersebut. Iran menggunakan Islam Syiah sebagai intepretasi dalam ranah politiknya, dengan tujuan menjadikan Syiah sebagai pemimpin dunia Islam di masa depan (Martin 1997: 92-108).



Sumber : UN Cartographic Section

**Gambar 1 : Peta Timur Tengah**

Sedangkan kelompok gerakan terorisme fokus pada penggunaan kekerasan dengan tujuan sebagai ancaman atau kekerasan agar mengintimidasi dan menciptakan situasi ketakutan atau teror guna membujuk atau menghalangi target utamanya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Terdapat banyak gerakan terorisme di Timur Tengah, namun pada masa ini terdapat satu gerakan terorisme yang paling memberikan dampak pada global. Gerakan tersebut bernama *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) (A. Conte 2010: hlm.21).

*Islamic State of Iraq and the Levant* (ISIL), atau *Islamic State of Iraq and Syria* atau *Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS), atau *Islamic State* (IS) adalah kelompok militan ekstrimis yang memiliki ideologi disebut *Salafist-Jihadism* atau disebut *Wahhabis*. Istilah *Salafi* digunakan untuk menunjukkan orang-orang yang mengikuti contoh dari para sahabat (*salaf*) dari Nabi mereka yang bernama Muhammad. *Salafi* percaya bahwa karena para sahabat belajar tentang Islam secara langsung dari Nabi, mereka memiliki pemahaman murni tentang iman. Pada saat ini, sebaliknya, iman telah dinodai oleh inovasi agama yang terinfeksi oleh komunitas Muslim dari waktu ke waktu. Sebagai akibatnya, umat Islam harus memurnikan agama dengan ketat mengikuti kitab mereka, yaitu al-Quran, *Sunnah* (cara atau tradisi Nabi Muhammad), dan persetujuan dari para sahabat. Setiap perilaku umatnya harus didukung oleh sumber-sumber agama tersebut. Sanksi bagi yang tidak mendukung kebenaran hal tersebut adalah kematian. Hal ini menjadi alasan kuat bagi ISIS menggunakan kekerasan bahkan ancaman kematian didalam memaksakan kehendaknya terhadap dunia (Quintan 2005: 75).

Pada awalnya gerakan ini bernama *al-Qaeda of Iraq* (AQI), dimana kelompok ini berfokus pada perlawanan terhadap invasi Amerika Serikat di Irak pada tahun 2003. Kemudian AQI mengganti nama menjadi *Islamic State of Iraq* (ISI) pada tahun 2006, agar dapat mengumpulkan anggota-anggota baru di luar anggota al-Qaeda. Hingga pada tahun 2010, pemimpin mereka yang bernama Abu Hamza dan Abu Omar tewas oleh serangan udara AS (Richard, B 2014: hlm.).

Pada tahun 2011, terjadi fenomena *Arab Spring* atau demokratisasi besar-besaran di Timur Tengah dan mencitakan ketidakstabilan di beberapa pemerintahan negara-negara Timur Tengah. ISI dengan pemimpin barunya yang

bernama Abu Bakar al-Baghdadi, melihat ketidakstabilan pada pemerintahan negara Suriah sebagai kesempatan baik untuk memulai cita-citanya. Suriah adalah negara yang sangat berdekatan dengan Irak. *Arab Spring* menciptakan kelompok-kelompok pemberontak di Suriah guna melawan rezim pemerintahan Suriah pada saat itu. ISI melebarkan sayapnya di Suriah dengan bergabung pada salah satu organisasi ekstremis di Suriah yang bernama *Jabhat al-Nusra* (JN) pada 9 April 2013 dan merubah nama menjadi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) (Colin, T 2014: 2).

ISIS membangun basis kekuatannya di Suriah dengan mendirikan markas utamanya di Raqqa pada bulan Januari tahun 2014, dimana mereka mampu merebut kontrol total setelah mengusir semua kelompok pemberontak lainnya. Meskipun serangan balasan untuk merebut Raqqa oleh fraksi lain dilakukan dengan taktik brutal, ISIS mampu memegang posisi dan mengkonsolidasikan basis kekuatannya di Raqqa. Sehingga ISIS secara efektif mampu memberlakukan kontrol antar daerah-daerah di Suriah dengan memberdayakan sekutu mereka dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Dari Raqqa ISIS membentangkan sayapnya di Suriah ke arah selatan untuk memperebutkan ladang minyak di kota Deir ez-Zour, dan ke arah utara menuju kota Aleppo untuk memperebutkan pabrik senjata dari penjagaan tentara pemerintah. Selama perjuangannya di Suriah, ISIS tidak pernah melupakan Irak. Di saat yang bersamaan, ISIS menyerang Fallujah dan Ramadi di provinsi Anbar. Pada awal bulan Juni ditahun yang sama ISIS menyerbu seluruh Irak Utara dan merebut kota Mosul, kota terbesar kedua di Irak, dengan bantuan aliansi yang terdiri dari para mantan *Ba'athist*, penduduk asli Irak, dan pasukan pemberontak Sunni yang lain. Hingga pada tanggal 29 Juni tahun 2014, hari pertama *Ramadhan* di bulan suci umat Islam, ISIS menyatakan dirinya sebagai Kepemimpinan umat muslim di dunia, dan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai *Khalifah* Ibrahim II, kemudian secara langsung menyerukan loyalitas kepada seluruh umat Islam didunia dengan merubah nama menjadi *Islamic State* (IS). Perubahan nama ini menjadi strategi ISIS untuk mengumpulkan kekuatan global (Elliot. F 2015: 11).

IS atau lebih disebut ISIS, tidak lagi dipandang hanya suatu gerakan teroris, tetapi menjadi sebuah organisasi politik dan militer yang berintepretasi radikal dengan Agama Islam sebagai pandangan filosofis politiknya dan berusaha untuk memaksa dengan kekuatan kepada seluruh Negara didunia baik Negara Muslim maupun non-Muslim. ISIS dibawah pimpinan al-Baghdadi memiliki tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Secara jangka pendek tujuannya adalah menggabungkan dan menguasai wilayah Suriah dan Irak. Secara jangka menengah tujuannya adalah menggabungkan dan meluaskan kendali terhadap wilayah Irak dan Suriah dan tahapan selanjutnya meningkat hingga Negara-negara Sunni yang bertetangga. Tujuan terakhir adalah dominasi total terhadap dunia (Elliot. F 2015: 15).

Keberadaan ISIS membuat kondisi konflik di Suriah semakin memanas. Rezim Assad tidak lagi dapat fokus hanya pada memenangkan pemerintahan Suriah dari para oposisinya. Tetapi juga harus menghilangkan keberadaan ISIS di Suriah. Hal ini dikarenakan keberadaan ISIS menjadi penghalang terkuat bagi rezim Assad untuk menstabilkan konflik Suriah. Menghadapi hal yang rumit ini rezim Assad meminta sebuah dukungan dari negara terdekatnya, yaitu Iran.

Iran dan Suriah sudah menjadi aliansi bahkan sejak tahun 1980 ketika perang Iran melawan Irak. Suriah mendukung Iran dengan menutup jalur pipa minyak milik Irak yang melalui Suriah. Kemudian pada tahun 1982, Iran dan Suriah bekerjasama dalam melawan Imperialisme Barat dan Zionisme dengan memberikan dukungan pada Hizbullah melawan Israel. Iran dan Suriah saling berbagi anti Imperialisme dan Zionisme Hingga pada bulan Juni tahun 2006, Menteri pertahanan dan Iran menandatangani kerjasama militer melawan ancaman Israel dan Amerika Serikat pasca serangan 11 September 2001 yang menjadi awal invasi Amerika Serikat di Irak. Pada tahun 2011, terjadinya *Arab Spring* mempengaruhi stabilitas Suriah dengan terjadinya protes terhadap pemerintahan Assad. Iran memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan negaranya terhadap Suriah dengan meningkatkan bantuan politik dan militer untuk menetralkan para posisi Assad dimanasalah satunya adalah gerakan ISIS (Nader 2014: 81-84).

Iran menjadi negara anti Imperialisme Barat sejak terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979, dengan ideologi revolusioner Islam yang bertujuan mengubah sistem tatanan masyarakat Islam di Iran. Dimana sebelum terjadinya revolusi, Iran cenderung bersikap mendukung Amerika Serikat pada Perang Dingin. Ideologi revolusioner Islam melihat melihat Zionisme dan dan Imperialisme Barat seperti dua koin yang sama dalam mempengaruhi negara-negara Islam. Iran sebagai negara yang mayoritas penduduknya bersekte Syiah, juga menganggap sekte Sunni sebagai ancaman bagi Republik Islam Iran. Sehingga ideologi revolusioner Islam turut menjadi sarana bagi Iran dalam percobaan dominasi Syiah terhadap Sunni di Timur Tengah (ed. Kristina 2015: 35).

Iran dan Suriah memiliki persamaan secara ideologis dan kerjasama yang terbentuk secara historis. Menjadikan Suriah sebagai negara aliansi Iran yang paling terdekat. Kemudian keberadaan ISIS di Suriah dan Irak sebagai salah satu gerakan ekstremis Sunni, menjadi ancaman bagi ideologi revolusioner Iran. Kedua hal tersebut menjadi motif bagi Iran mengatur strategi dalam mendukung pemerintahan rezim Assad di Suriah. Iran mengatur strategi untuk melawan oposisi rezim Assad dan menghadapi ISIS dalam satu pengaplikasian sehingga tidak dapat dipisahkan. Iran telah membuat kesepakatan untuk menjadi penasihat bagi militer Suriah dalam rangka mengatur strategi untuk mempertahankan kekuatan rezim Assad dan menjaga kestabilan Suriah.

Dalam rangka memperkuat rezim Assad, Iran juga menggandeng kelompok-kelompok paramiliter dari Lebanon dan Irak untuk masuk ke Suriah sebagai proksi dari Iran. Di Suriah sendiri juga terdapat kelompok paramiliter, yang kemudian di danai dan dilatih oleh Iran. Iran dan Suriah juga sepakat menerima masuknya kekuatan negara besar seperti Rusia dalam menjalin aliansi guna mendukung rezim Assad. Iran sudah memulai strategi-strateginya di Suriah pada tahun 2012 meskipun ISIS sendiri baru masuk di Suriah pada tahun 2013. Hal ini dilakukan karena dalam strategi yang sama, Iran juga bertujuan untuk menghadapi kelompok-kelompok pemberontak yang sudah ada muncul sejak Arab Spring. Lagipula meskipun ISIS resmi masuk ke Suriah pada tahun 2013, tetapi motivasi ISIS untuk masuk ke Suriah juga sudah terlihat sejak tahun 2011.

## I.2 Rumusan Masalah

Iran sebagai negara dengan sekte Syiah sebagai interpretasi politiknya tidak mudah memiliki kawan di Timur Tengah yang mayoritasnya memeluk sekte Sunni. Sehingga harus strategis dalam mempertahankan dan mendapatkan kepentingan negaranya. Kepentingan Iran terhadap Timur Tengah tidak hanya menjadikan Syiah pemimpin dari umat Islam, tetapi juga membendung imperialisme Barat dan Zionisme. Upaya Iran yang paling menarik adalah bagaimana mempertahankan aliansinya dengan Suriah dari sejak revolusi Iran hingga pada masa ini dimana ISIS sebagai salah satu rintangan Iran dalam mendapatkan kepentingannya. Sehingga dari pembahasan diatas dapat ditarik sebuah pertanyaan yang menarik, yaitu *Bagaimana strategi Iran menghadapi ISIS di Suriah periode 2011-2015 ?*

## I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui informasi asal mula dan pengaruh ISIS di Suriah.
- b. Memahami pandangan Iran terhadap ISIS di Suriah.
- c. Menganalisa strategi dan kepentingan Iran menghadapi ISIS di Suriah.

## I.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- a. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan informasi dan data bagi perkembangan Program Studi Hubungan Internasional, tentang strategi negara Iran menghadapi ISIS di Suriah, dan dapat dijadikan sebuah referensi dalam melengkapi sebuah karya tulis.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan perkembangan pemahaman dan kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah tentang langkah yang gunakan negara Iran dalam mendapatkan kepentingannya di Suriah dengan menghadapi ISIS.

## I.5 Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul *Kebijakan Liga Arab dalam Konflik Suriah : Studi Kasus dukungan Liga Arab pada pihak oposisi Suriah tahun 2013* oleh Dimas Ardhiyanto, mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Liga Arab pada tahun 2013 untuk mendukung kelompok oposisi Suriah yang bertikai dengan rezim pemerintah Suriah. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui alasan kebijakan Liga Arab dalam memberi dukungan pada kelompok oposisi Suriah. Dari penelitian yang dilakukan, dapat terlihat bahwa kebijakan Liga Arab mendukung kelompok oposisi Suriah dipengaruhi oleh kepentingan negara anggotanya. Liga Arab dipandang sebagai instrumen yang digunakan oleh Arab Saudi dan Qatar untuk memaksimalkan kepentingan negaranya.

Kelompok oposisi penentang pemerintah terdiri dari berbagai kelompok-kelompok kecil yang begitu solid, seperti *National Coalition for Syrian* (NCS), *Free Syrian Army* (FSA), *Supreme Military Command* (SMC), *Syrian Liberation Front* (SLF), dan *Syrian Islamic Front* (SIF). Selain kelompok-kelompok diatas juga muncul kelompok yang dipandang radikal dalam melawan rezim pemerintahan, yaitu *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan *Jabhat al-Nusra* (JN). ISIS dan JN dipandang sebagai kelompok radikal yang tidak hanya berperang melawan rezim pemerintah, namun juga dengan kelompok oposisi lain. Hal ini mengakibatkan perebutan kekuasaan di wilayah-wilayah Suriah tidak hanya terjadi antara pihak oposisi dengan rezim pemerintah, namun juga diantara kelompok oposisi yang berbeda.

Suriah berubah menjadi arena perang yang sangat rumit antara kelompok yang berbeda serta cara dan tujuan yang juga berbeda. Berbagai upaya penyelesaian konflik telah diupayakan, mulai dengan cara diplomasi, bantuan senjata, hingga rencana intervensi militer. Salah satu rencana penyelesaian masalah intervensi militer melalui PBB gagal dilakukan karena mendapatkan tentangan dari Rusia dan China. Sedangkan upaya diplomasi pada konvensi Genewa 2 yang dipandang merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan konflik



di Suriah juga belum mampu mencapai hasil karena tidak semua pihak sepatutnya dengan usulan tersebut. Sehingga solusi terbaik untuk menyelesaikan perang yang terjadi di Suriah adalah melalui jalur diplomasi oleh Liga Arab dengan melibatkan semua pihak baik yang terlibat secara langsung di Suriah manapun pendukung dari masing-masing kelompok yang berada di luar Suriah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa anggota-anggota Liga Arab mempunyai kepentingan masing-masing.

Strategi Arab Saudi dan Qatar sebagai negara besar yang memiliki dominasi di dalam Liga Arab, menurut skripsi ini, adalah dengan membentuk aliansi untuk mencapai kepentingan negaranya dan mengimbangi kekuatan lain dalam memberi pengaruh di Suriah. Arab Saudi dan Qatar juga mendukung kelompok-kelompok kecil oposisi Suriah dalam menentang rezim Assad. Strategi ini memiliki kesamaan dengan strategi Iran menghadapi ISIS di Suriah, yaitu membentuk aliansi dengan negara besar seperti Rusia. Iran juga mendukung kelompok-kelompok kecil dalam menjalin kekuatan di Suriah. Namun juga terdapat perbedaan, yaitu strategi Iran justru untuk memperkuat rezim Assad, berbeda dengan strategi Arab Saudi dan Qatar yang berguna untuk melemahkan rezim Assad.

Selanjutnya adalah penelitian dalam bentuk skripsi berjudul ***Sikap Amerika Serikat terhadap Gerakan ISIS di Irak dan Suriah*** oleh Nining Anggriani mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional dari Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Amerika Serikat terhadap gerakan ISIS di Irak dan Suriah, untuk melihat faktor-faktor yang membuat Amerika Serikat berupaya untuk memberantas ISIS, serta bagaimana Amerika Serikat melakukan tindakan pencegahan terhadap gerakan ISIS tersebut. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa ISIS merupakan kelompok radikal yang memiliki pemikiran dan paham revolusioner yang melakukan gerakannya dengan cara-cara kekerasan dan berbasis di Irak dan Suriah. Sehingga melihat kondisi tersebut Amerika Serikat memiliki tanggung jawab moral terhadap ketertiban dan keamanan dunia serta memiliki kepentingan yang besar di Timur Tengah, khususnya di Irak dan

Suriah. Amerika Serikat menghadapi ISIS dengan sikap preventif dan refresif, baik dilakukan sendiri maupun dengan negara-negara sekutu di Asia, Eropa, dan Timur Tengah.

Selama puluhan tahun Amerika Serikat di Timur Tengah memiliki kepentingan seperti kontra terorisme, menghentikan penyebaran nuklir, mengamankan perdagangan bebas, menjaga keamanan kawasan, dan membela Israel dalam konflik Arab-Israel. Dalam menangani ISIS, Amerika Serikat memiliki kepentingan tersendiri berupa tujuan jangka menengah dan rencana jangka panjang. Tujuan jangka pendek Amerika Serikat adalah kebutuhan dalam peningkatan ekonomi melalui sumber alam terutama minyak dan gas. Rencana jangka panjang Amerika Serikat adalah berupa strategi dalam mengerahkan dukungan pada oposisi yang melawan pemerintahan Assad di Suriah, dimana ISIS menjadi hambatan dalam memberikan dukungan tersebut. Upaya preventif yang dilakukan Amerika Serikat adalah melakukan koalisi internasional sedangkan upaya refresif Amerika Serikat adalah dengan melakukan serangan militer terhadap gerakan ISIS.

Strategi Amerika Serikat menghadapi ISIS pada skripsi ini adalah upaya dalam bentuk preventif dengan membentuk koalisi internasional dan upaya refresif dengan melakukan serangan militer. Strategi ini memiliki kesamaan dengan strategi Iran dalam menghadapi ISIS, yaitu menciptakan koalisi antara Iran, Suriah, dan Rusia sebagai upaya preventif terhadap kekuatan Amerika Serikat dan koalisi internasional dalam memberikan pengaruh di Suriah. Iran juga menggunakan tindakan refresif dengan memberikan bantuan pada serangan militer Suriah terhadap kelompok oposisinya.

Kemudian hasil penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul ***ISIS : The Dangers for Israel*** oleh **Efraim Inbar**, profesor bidang studi politik di **Bar-Ilan University**. Artikel ini membahas tentang ISIS menjadi ancaman bagi Israel dengan hilangnya kontrol pemerintah Suriah di wilayah perbatasan Israel-Suriah, khususnya di Dataran Tinggi Golan. Kehadiran ISIS di sepanjang perbatasan Israel dapat memungkinkan terjadinya serangan teroris di Israel atau melakukan penyerangan menggunakan mortar dan rudal jarak pendek. Untuk mencegah

kemungkinan tersebut, Israel membangun pagar pembatas baru di Golan, lalu melakukan penyebaran *Israel Defense Force* (IDF) di wilayah tersebut, selain itu juga bekerja sama dengan Yordania dalam melakukan pencegahan masuknya ISIS melalui Jabhat al-Druze di Selatan Suriah.

Selama ISIS tidak menyerang Israel, Israel tidak memiliki alasan untuk menyerang ISIS secara langsung. Lagipula peperangan antara rezim Assad dan Hizbullah melawan ISIS justru menguntungkan kepentingan Israel, dikarenakan rezim Assad dan Hizbullah adalah proksi dari musuh abadi Israel, yaitu Iran. Kebijakan Israel sejauh ini memilih untuk tidak terlibat pada konflik internal negara-negara tetangganya yang terpengaruh oleh gejolak kekacauan di Timur Tengah. Selain itu, Israel telah belajar untuk menggunakan rekayasa politik melebihi kemampuannya. Israel mengadopsi peran sebagai penonton kecuali dalam keadaan yang mempengaruhi langsung keamanan nasionalnya. Sehingga sesuai dengan doktrin keamanan nasionalnya, Israel lebih memilih tindakan sepihak dan bukan operasi dalam rangka koalisi Internasional jika ISIS menetapkan kehadirannya di dekat perbatasan Israel.

Strategi Israel menghadapi ISIS pada skripsi ini lebih pada adopsi peran penonton dan tindakan sepihak kecuali ISIS sudah memberikan dampak langsung pada keamanan nasionalnya. Berbeda dengan strategi Iran yang lebih memilih terjun langsung dan terlibat dalam konflik di Suriah. Israel justru merasa diuntungkan dengan keberadaan ISIS di Suriah yang mengganggu kepentingan Iran di Suriah.

## **I.6 Kerangka Pemikiran**

### **I.6.1 Konsep Terorisme**

Terorisme memiliki banyak definisi yang berbeda-beda dan mudah berubah dari masa ke masa. Sehingga sulit menemukan definisi yang tepat dari terorisme. Sebagai acuan dalam mendefinisikan, kita akan menggunakan beberapa pernyataan dari lembaga internasional seperti PBB, baru kemudian didukung dengan pernyataan beberapa peneliti. Deskripsi terorisme menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB 1566 (2004) adalah tindakan yang dimaksudkan untuk

menyebabkan kematian atau luka serius terhadap warga sipil atau *non-combatant* (non militer), dengan tujuan menurut sifat dan konteksnya adalah untuk mengintimidasi penduduk, atau untuk memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (United Nation Security Council, 2014).

Menurut Majelis Umum PBB, terorisme adalah tindak pidana yang dimaksudkan atau diperhitungkan untuk memprovokasi keadaan teror pada masyarakat umum, sekelompok orang atau orang-orang tertentu untuk tujuan politik yang dalam keadaan apapun tidak dapat dibenarkan, apapun pertimbangan politis, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama, atau alam lain yang digunakan untuk membenarkan mereka (United Nation General Assembly, 1994).

Menurut A. Conte dalam buku yang berjudul *Human Rights in the Prevention and Punishment of Terrorism*, yang membedakan tindakan kekerasan teroris dan tindak pidana, terletak pada fokus tujuan, peserta pelaku, dan target korban. Korban atau target fisik dari aksi teror, seperti orang atau bangunan, adalah bukan target utama dari tindakan tersebut, sekedar sebuah pesan ancaman bagi pemerintah atau organisasi internasional. Selanjutnya, tujuan dari ancaman atau kekerasan adalah untuk mengintimidasi dan menciptakan situasi ketakutan atau teror untuk membujuk atau menghalangi target utama dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penyebab tindakan tersebut dilakukan untuk memajukan sebuah ideologi, politik, atau agama (A. Conte 2010: 21).

Menurut Gerard .C dan Arnaud. B dalam buku yang berjudul *The History of Terrorism*, terorisme memiliki banyak arti yang berbeda bagi subjek yang berbeda. Tidak ada gunanya mencari definisi berdasarkan logika atau istilah yang terkait dengan ranah ilmu politik atau sosial, terutama ketika istilah tersebut membawa konotasi emosional yang negatif. Penerimaan keberadaan secara umum dari asumsi dasar dan arti kata yang diperlukan untuk mendefinisikan terorisme tidak dapat ditemukan di bumi ini. Mencapai kesepakatan dalam menentukan arti dari istilah terorisme bukanlah tujuan penting, tetapi klasifikasi melalui fenomena yang termasuk dalam kategori umum, merupakan langkah pertama yang penting dalam penelitian. Hal ini diperlukan untuk membedakan berbagai kondisi

kekerasan antara beragam mode konflik jika kita ingin mendapatkan pemahaman tentang asal-usul mereka, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka, dan bagaimana cara mengatasi mereka. Tujuan, situasi, dan metode yang melibatkan kekerasan negara terhadap warga negaranya, berbeda dengan yang melibatkan orang atau kelompok pemberontak terhadap negaranya sendiri atau negara lain (eds. Gerard. C & Arnaud Blin 2007: 13).

**Tabel 1 : Klasifikasi Kelompok Kekerasan**

		Target	
		Negara	Warga Negara
Pelaku	Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perang skala penuh</li> <li>• Aktifitas yang menimbulkan perang pada masa damai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penindasan penegakan hukum legal dan illegal</li> </ul>
	Warga Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perang gerilya</li> <li>• Terorisme pemberontak</li> <li>• Kudeta</li> <li>• Revolusi Leninis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terorisme</li> <li>• Vigilante</li> <li>• Terorisme etnis</li> </ul>

Sumber : The History of Terrorism

Dalam buku yang berjudul *Fatal Future ? Transnational Terrorism and The New Global Disorder*, Richard M. Pearlstein mengklasifikasikan perubahan organisasi teroris dari tatanan kekacauan global periode lama pada awal tahun 1970-an hingga periode baru yaitu masa kini, menjadi tiga generasi utama, diawali dari periode dimana sebuah organisasi teroris dibiayai dan aktif didukung oleh pemerintah, hingga menjadi organisasi yang melakukan operasi lintas batas negara. Klasifikasi generasi teroris tersebut, yaitu :

- a. Generasi Pertama : Organisasi Teroris Intranasional
- b. Generasi Kedua : Organisasi Teroris Internasional
- c. Generasi Ketiga : Organisasi Teroris Transnasional

Terdapat perbedaan fungsional dan organisasional dari tiga generasi tersebut. Generasi pertama, organisasi teroris intranasional, memiliki keterbatasan dalam penyerangan dikarenakan keterikatan oleh suatu negara. Mereka didanai dan didukung secara aktif dan eksklusif melalui cara-cara pribadi, sehingga mereka tidak memerlukan dukungan dari negara-negara lain. Secara signifikan dengan pendanaan atau dukungan secara pribadi, organisasi teroris ini akan tetap berada didalam perbatasan negaranya. Sedangkan generasi kedua, yaitu organisasi teroris internasional dan generasi ketiga, yaitu organisasi teroris transnasional, secara rutin dapat melakukan kegiatan mereka antar perbatasan negara. Namun kedua organisasi tersebut memiliki perbedaan tertentu. Organisasi teroris internasional biasanya membutuhkan dan menerima dana atau dukungan dari sponsor negara, sedangkan organisasi teroris transnasional tidak memerlukan atau menerima sponsor dari negara. Dari ketiga generasi organisasi teroris tersebut, dua generasi sebelumnya dapat menerima dana atau dukungan dari negara, organisasi swasta, ataupun perorangan. Tidak seperti organisasi teroris intranasional yang tidak menerima dana atau dukungan tersebut (Richard. M. P 2004: 3-4).

Perkembangan dalam sistem tatanan politik global telah berubah menjadi baru seiring dengan berkembangnya kekacauan global. Sistem global secara tradisional diklasifikasikan menurut jumlah pusat-pusat kekuasaan di dunia, yang kemudian berubah menjadi sistem polaritas melalui momen historis yang berbeda tiap negara. Terdapat tiga sistem polaritas, yang pertama adalah sistem bipolar, dimana dua negara menciptakan aliansi negara. Kedua adalah sistem tripolar, dimana tiga negara menciptakan aliansi negara yang lebih dapat mendominasi pada tatanan global. Ketiga adalah sistem multipolar, dimana terdapat 4 negara atau lebih untuk menciptakan dominasi politik global (Richard. M. P 2004: 7).

Munculnya sistem polaritas tersebut menciptakan disintegrasi atau umur yang lebih pendek pada aliansi militer besar, sehingga memunculkan sejumlah kekuatan kecil dan menengah baru, kemudian meningkatkan mudah ditembusnya perbatasan negara, dan meningkatkan pengaruh pada aktor-aktor global jenis baru. Perkembangan ini telah memuncak dan menjadikan sistem global lebih padat,

kompleks, dan tidak teroganisir, dimana sistem polaritas semakin kehilangan relevansinya. Konsep tradisional dari sistem polaritas global telah tersingkirkan oleh gagasan baru dari sistem global, yaitu *polyplex*. *Poly* berarti banyak, dan *plex* diambil dari kata *complex*. Kompleks yang dimaksud adalah sebuah komplikasi ekstrim dari gangguan global sehingga membangkitkan tatanan kekacauan global baru diantara aktor global. Banyaknya jenis aktor global menciptakan suatu sistem global menjadi lebih sulit berinteraksi, sulit diatur, padat, menyusut, non-polar, dan semakin cepat berkembang didunia (Richard. M. P 2004: 11-12).

Kondisi kekacauan tersebut menciptakan munculnya organisasi transnasional yang mandiri, didukung secara pribadi dengan melewati perbatasan-perbatasan negara untuk mencari negara sponsor. Organisasi internasional dan organisasi transnasional memiliki perbedaan sebagai aktor global. Organisasi internasional atau organisasi antar pemerintahan memerlukan kesepakatan antar negara untuk mendapatkan tujuan mereka, sedangkan organisasi transnasional yang tidak memiliki wilayah, membutuhkan akses ke negara-negara untuk mengejar tujuan mereka. Akses tersebut didapatkan melalui ajakan ataupun penyusupan. Terdapat delapan jenis organisasi transnasional, yaitu perusahaan, sindikat kejahatan, tenaga profesional, kemanusiaan, lingkungan, organisasi keagamaan, pemuja agama, dan organisasi teroris (Richard. M. P 2004: 13).

Organisasi teroris transnasional memiliki tiga taktik dasar untuk mengamankan akses ke wilayah antar negara-negara yang dengan tujuan eksploitasi. Pertama, membawa keyakinan ideologi umum atau kepentingan politik bersama dengan rezim yang berkuasa dari negara atau wilayah bagian negara tersebut. Kedua, menolak atau menurunkan otoritas yang sah dari negara tersebut, atau membuat tantangan yang efektif terhadap otoritas negara tersebut menggunakan agama, etnis, atau politik. Ketiga yaitu menggunakan berbagai metode rahasia yang digunakan untuk menembus batas-batas negara ketika pemerintah pusat dari negara tersebut tidak ada, lemah, atau bahkan derajat otoritas yang lebih kuat (Richard. M. P 2004: 16).

Setelah melalui beberapa generasi terorisme telah mengalami perubahan menjadi transnasional terorisme. Karakteristik yang paling berbeda dari generasi

tersebut terletak pada kemampuan terorisme menembus batas-batas negara. ISIS telah mengklaim wilayahnya atas dua negara yaitu Suriah dan Irak., bahkan akan bercita-cita untuk melebarkan sayap hingga global. Penulis menggunakan terorisme sebagai acuan dalam menjelaskan tindakan-tindakan ISIS sebagai permasalahan.

### **I.6.2 Konsep Strategi**

Menurut Carl von Clausewitz dalam bukunya yang berjudul *On War*, Strategi adalah sesuatu yang digunakan dalam pertempuran dengan tujuan perang. Dikarenakan strategi itu sendiri terbatas hanya pada pertempuran, teori strategi harus mempertimbangkan pada sarana utama dalam eksekusinya, yaitu kekuatan tempur. Strategi juga harus mempertimbangkan hak pribadi dan hubungan terhadap kekuatan lain, dalam membentuk pertempuran dan pada gilirannya akan berdampak pada pertempuran itu sendiri (Carl von Clausewitz 1976: 1).

Menurut Colin S. Gray dalam bukunya yang berjudul *Modern Strategy*, strategi adalah jembatan penghubung antara kekuatan militer terhadap tujuan politik, akan tetapi kekuatan militer tidak selalu menjadi tujuan politik, sehingga strategi adalah cara yang dibuat dengan kekuatan dan ancaman kekerasan untuk tujuan politik. Pernyataan ini di adaptasi dari pernyataan Clausewitz yang lebih singkat dan padat namun sempit, bahwa strategi adalah cara yang dibangun untuk objek perang. Kedua definisi tersebut berkembang kecakupan yang lebih luas pada instrumen-instrumen kebijakan dibanding pada militer. Strategi berusaha untuk mengarahkan dan menghubungkan penggunaan instrument-instrumen tersebut untuk tujuan politik (Colin S. Gray 1999: 17).

Strategi memiliki tujuh belas dimensi yang dibagi dalam tiga kategori meruju, yaitu pertama, dimensi strategi dalam kategori *People and Politics* yang terdiri dari orang atau individu, masyarakat, materi dan mentalitas, politik dan etika. Kedua, dimensi strategi dalam kategori *Preparation for War* yang meliputi ekonomi dan logistik, organisasi, administrasi militer, informasi dan inteligensi, doktrin dan teori strategi, dan teknologi. Ketiga, dimensi strategi dalam kategori *War Proper* yang terdiri dari operasi militer, pimpinan (dalam politik dan



militer), geografi, pergesekan dan lawan. Dimensi-dimensi tersebut merupakan dimensi yang memiliki kontribusi dalam penyusunan dan pelaksanaan dari strategi. Dimensi tersebut pun terkadang saling mempengaruhi satu sama lain, bahkan terdapat dimensi yang lebih fundamental dari dimensi lainnya (Colin S. Gray 1999: 24).

Iran mendukung rezim Assad ketika terjadi pemberontakan di Suriah. Iran juga membantu Suriah melawan ISIS. Sehingga Iran perlu mengatur strategi dalam mempertahankan rezim Assad dan mendapatkan kepentingan nasional di Suriah. Strategi menjadi acuan penulis dalam mencari jawaban dari pertanyaan penelitian.

### **I.6.3 Teori Aliansi**

Menurut Stephen M. Waltz pada bukunya yang berjudul *The Origins of Alliances*, aliansi adalah sebuah kekuatan yang membawa negara-negara untuk bersama-sama dan apabila mengendalikan mereka secara terpisah akan berdampak pada keamanan dari masing-masing negara dengan menentukan seberapa besar ancaman yang mereka hadapi dan berapa banyak bantuan yang mereka terima. Pada waktu yang bersamaan, faktor-faktor yang menentukan bagaimana negara-negara tersebut memilih mitra aliansi akan membentuk sebuah evolusi pada sistem internasional secara keseluruhan. Aliansi terbagi menjadi dua perilaku yaitu *Balancing* atau mengimbangi dan *Bandwagoning* atau mengekor (Stephen M. W 1990: 1).

*Balancing* secara umum adalah tindakan dimana suatu negara menghadapi ancaman dari luar dengan bersekutu pada negara lain untuk melawan ancaman yang dibentuk oleh negara lainnya. Semakin besar kumpulan kekuatan negara yang mengancam, akan semakin besar pula hasrat negara lain untuk bersekutu melawan negara tersebut. Semakin dekat dengan negara yang lebih kuat, akan semakin besar hasrat negara terdekat untuk beraliansi melawan negara tersebut. Oleh karena itu, negara tetangga lebih sedikit berkeinginan untuk menjadi sekutu dibandingkan bersekutu dengan negara yang terpisah oleh setidaknya satu kekuatan lain. Semakin besar kemampuan menyerang suatu negara, akan semakin

besar hasrat negara lain untuk bersekutu melawan negara tersebut. Oleh karena itu, negara dengan kemampuan militer berorientasi penyerangan, akan mengakibatkan negara lain membentuk koalisi pertahanan. Semakin agresif niat yang dirasakan suatu negara, maka negara lain akan bersekutu melawan negara tersebut. Aliansi yang dibentuk pada masa perang akan pecah apabila musuh telah dikalahkan (Stephen M. W 1990: 32).

*Bandwagoning* secara umum adalah tindakan dimana suatu negara ketika menghadapi ancaman dari luar dengan bersekutu pada negara yang memiliki ancaman paling kuat. Semakin besar kemampuan yang dapat dikumpulkan suatu negara, akan semakin besar hasrat negara lain untuk bersekutu dengan negara tersebut. Semakin dekat dengan negara terkuat, akan semakin besar hasrat negara terdekat untuk bersekutu dengan negara tersebut. Semakin besar kemampuan penyerangan suatu negara, akan semakin besar hasrat negara lain untuk bersekutu. Semakin agresif niat yang dirasakan suatu negara, akan semakin sedikit keinginan negara lain untuk bersekutu melawan negara tersebut. Aliansi yang dibentuk untuk melawan ancaman akan terpecah ketika ancaman tersebut menjadi lebih serius (Stephen M. W 1990: 32-33).

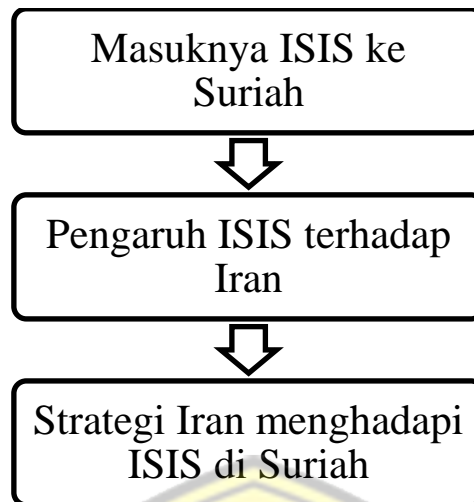
Terdapat beberapa motif dalam membentuk formasi aliansi menurut hipotesa Stephen M. Waltz dalam buku ini. Pertama adalah Ideologi dan Formasi Aliansi. Secara umum adalah semakin serupa ideologi domestik dari dua atau lebih negara, semakin besar kemungkinan mereka bersekutu. Semakin sentralisasi dan hirarkis gerakan yang ditentukan oleh ideologi, aliansi yang dihasilkan akan semakin bersifat konflik dan rapuh. Oleh karena itu, gerakan seperti Leninis akan lebih sulit menemukan aliansi yang stabil untuk dipertahankan dibanding monarki atau demokrasi. Semakin sebuah negara mempersepsikan dirinya aman, semakin besar dampak pada ideologi atau pilihan aliansi. Oleh karena itu, keselarasan ideologis lebih diminati pada dunia bipolar. Dan oleh sebab itu juga semakin besar keuntungan pada pertahanan peperangan, akan semakin besar dampak ideologi pada pilihan aliansi (Stephen M. W 1990: 40).

Kedua adalah Bantuan Asing dan Formasi Aliansi. Secara umum adalah semakin besarnya bantuan yang diberikan suatu negara pada negara lain, akan

semakin besar kemungkinan kedua negara tersebut akan membentuk aliansi. Semakin banyaknya bantuan, semakin besar kontrol oleh donor atas penerimanya. Bantuan asing adalah bentuk khusus dari tindakan balancing. Oleh karena itu, semakin besar ancaman dari luar kepada negara penerima bantuan, akan berdampak pada semakin besarnya bantuan dalam aliansi. Semakin besar monopoli dari negara pemberi bantuan pada komoditas yang tersedia, akan semakin besar yang diambil negara tersebut dari negara penerima. Semakin besar kesenjangan ketergantungan pada sokongan yang diberikan negara pemberi bantuan, akan semakin besar yang diambil dari negara penerima. Semakin besar kesenjangan motivasi sokongan yang diberikan negara pemberi bantuan, akan semakin besar yang diambil negara tersebut dari negara penerima. Hal ini dikarenakan keamanan negara penerima biasanya lebih genting, bagaimanapun, kesenjangan pada motivasi tetap akan menyokong negara penerima. Semakin lemah aparat pembuat kebijakan politik dalam negeri dari negara pemberi bantuan, semakin sedikit pengaruh negara tersebut untuk memanfaatkan negara penerima (Stephen M. W 1990: 46).

Iran membentuk hubungan dengan Suriah secara historis dan memiliki kesamaan ideologis. Iran dan Suriah saling membantu dalam menghadapi konflik domestik masing-masing negara. Hubungan antara kedua negara tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ketika terjadi konflik di Suriah, Iran dan Suriah turut menggandeng negara dengan kekuatan besar seperti Rusia. Penulis menggunakan aliansi untuk menjelaskan perilaku-perilaku negara tersebut.

## I.7 Alur Pemikiran



## I.8 Asumsi

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa asumsi dasar, yaitu :

- a. Masuknya ISIS kedalam Suriah menjadi salah satu akar permasalahan yang memperkeruh situasi politik di Suriah yang mana hal tersebut menjadi perhatian Iran sebagai negara yang mendukung rezim Assad untuk tetap berkuasa di Suriah.
- b. Iran tidak bisa secara langsung menghadapi ISIS dikarenakan lemahnya dukungan negara-negara Timur Tengah terhadap Iran yang pada dasarnya memiliki sekte mayoritas Sunni, sehingga Iran perlu mengatur strategi dalam menghadapi ISIS lebih preventif.

## I.9 Metode Penelitian

### I.9.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat atau fenomena suatu masalah yang dipaparkan secara jelas. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan

melalui teknik survey, studi kasus, studi komparatif, studi tentang waktu dan gerak, analisis tingkah laku, dan analisis dokumenter (Suryana, 2010:16).

### **I.9.2 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder yang dapat mendukung pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian serta secara keilmuan dapat dibuktikan. Data primer yang digunakan adalah pernyataan resmi dari pemerintah atau kutipan pernyataan dari lembaga pemerintahan. Data sekunder yang digunakan yaitu berupa buku-buku, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah studi Hubungan Internasional, majalah dan surat kabar, serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet.

### **I.9.3 Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur merupakan penelusuran literatur yang bersumber dari buku, media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang bertujuan untuk menyusun data yang digunakan dalam melakukan penelitian. Kajian teoritis yang bertujuan untuk menelusuri dan mencari dasar-dasar yang berkaitan erat dengan penelitian secara teori yang mencakup masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional.

### **I.10 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab, dimana setiap bab terdiri dari sub dan sub-sub bab yang saling berhubungan, dengan rincian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran, asumsi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II PENGARUH ISIS DI SURIAH TERHADAP IRAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan sejarah terbentuknya ISIS dan menjelaskan dinamika pergerakan ISIS di Suriah serta menjelaskan sudut pandang Iran terhadap ISIS hingga keterlibatan Iran dalam mempertahankan hubungan dengan rezim pemerintah Suriah untuk menghadapi ancaman ISIS.

## **BAB III STRATEGI IRAN MENGHADAPI ISIS DI SURIAH**

Pada bab ini, penulis akan menganalisa strategi-strategi yang diterapkan oleh Iran dalam menghadapi ISIS di Suriah.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah dan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya serta pemberian saran oleh penulis.

